

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja diantaranya adalah:

1. M. Taufik Zamroni (2007), dalam studinya yang berjudul analisis penyerapan tenaga kerja pada industri kecil (Studi di Industri kecil Mabel Di Kota Semarang) dengan menggunakan analisis linier berganda. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel (upah (X1), produktivitas (X2), modal (X3) dan non upah (X4) baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja (Y)). Hal ini dapat ditentukan dengan hasil uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan uji F (simultan) untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama. Besar pengaruh variabel (upah (X1), produktivitas (X2), modal (X3), dan non upah (X4) terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja (Y) sebesar 74,1 % sedangkan sisanya 25,9% diterangkan oleh faktor lain.
2. Rezza Aldila (2011), dalam studinya yang berjudul analisis pengaruh tenaga kerja, output terhadap indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di wilayah Jawa Tengah Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah. Variabel independen yang digunakan meliputi Pangsa Penyerapan Tenaga

Kerja (X1) dan Output (X2), sedangkan variabel dependen adalah indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah (Y). Sampel yang diambil berjumlah 35 kabupaten/kota dengan metode *probability sampling* dengan menggunakan teknik *sensus sampling*. Alat analisisnya meliputi uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas uji normalitas dan uji autokorelasi, serta analisis regresi berganda yang meliputi uji *goodness of fit* yakni koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (uji statistik F) uji signifikansi parameter individual (uji t). Berdasarkan pengujian, didapatkan hasil bahwa semua variabel yang digunakan memenuhi kriteria pengujian yang digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pangsa penyerapan tenaga kerja industri manufaktur dan output berpengaruh positif dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,00 dan 0,017. Koefisien determinasinya (*adjusted R₂*) sebesar 0,998. Artinya 99,8 persen indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel. Sedangkan 0,2 persen lainnya dijelaskan diluar model.

3. Nur Fadilah (2012), dalam studinya berjudul Analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dan investasi (studi kasus di sentra industri di Tegal). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja diperoleh nilai t hitung sebesar -0,717 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 1,671 dengan signifikansi sebesar $0,476 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$), hal ini berarti upah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja. Hasil pengujian pengaruh produktivitas terhadap penyerapan tenaga kerja diperoleh nilai t hitung sebesar -8,148 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,671 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$), hal ini berarti bahwa produktivitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil pengujian pengaruh modal kerja terhadap penyerapan tenaga kerja diperoleh nilai t hitung sebesar 13,698 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,671 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$), hal ini berarti bahwa modal kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 128,454 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,76 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti upah, produktivitas dan modal kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

4. Andi Neno Ariani (2013), dengan studinya berjudul Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada (studi kasus di industri kecil dan menengah di Kabupaten Pinrang) penelitian tersebut menunjukkan dengan metode 2SLS bahwa variabel X (jumlah usaha, nilai investasi, upah minimum) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (penyerapan tenaga kerja) melalui variabel perantara (output sektor industri). Dengan nilai F-Statik sebesar **45,510** dengan probabilitas **0,0000** menunjukkan variabel bebas secara simultan signifikan terhadap variabel terikat dengan taraf

signifikansi $\alpha = 0.05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemilihan variabel dan model mampu menjelaskan fenomena yang diamati. Perubahan variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Hubungan variabel jumlah usaha, nilai investas, dan upah minimum terhadap variabel penyerapan tenaga kerja melalui output sektor industri yang dimasukkan dalam persamaan ternyata menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai probabilitas 0,0000 terhadap model bagi hasil bank syariah. Artinya, bahwa variabel tersebut nyata pada tingkat kepercayaan 95% terhadap model output sektor industri. Nilai koefisien output sektor industri sebesar 0,00003 menunjukkan jika terdapat kenaikan output sektor industri sebesar 1% maka akan mempengaruhi kenaikan Penyerapan tenaga kerja sebesar 0.00003%. Demikian pula bila terjadi penurunan output sektor industri sebesar 1% maka akan berdampak pada penurunan Penyerapan tenaga kerja sebesar 0.00003%.

5. Ahmad Mujahidul Furqon (2014), dalam studinya berjudul Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik. Dengan hasil penelitian menunjukkan nilai Probabilitas PDRB adalah 0,0203. Nilai ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 5$ persen atau 0,05 ($0,0203 < 0,05$) yang berarti kondisi tersebut menolak H_0 dan menerima H_1 . Variabel PDRB secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur. Adapun nilai koefisien PDRB adalah 0.036771 yang artinya bahwa variabel PDRB berpengaruh

signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik. Sehingga dapat diartikan bahwa jika terjadi peningkatan PDRB 1 persen maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Gresik sebesar 0,03677 persen. Nilai probabilitas dari variabel UMK berdasarkan hasil regresi tabel 4.5 adalah sebesar 0,0582. Nilai ini lebih besar dari nilai $\alpha = 5$ persen atau 0,05 ($0,0582 > 0,05$) yang berarti kondisi tersebut menolak H_1 dan menerima H_0 . Variabel UMK secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur. Jumlah unit usaha, dari hasil output regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai Probabilitas Jumlah Unit Usaha adalah 0,0005. Nilai ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 5$ persen ($0,0005 < 0,05$) yang berarti kondisi tersebut menolak H_0 dan menerima H_1 . Adapun nilai koefisiennya adalah 0,820860, menunjukkan bahwa variabel Jumlah Unit Usaha secara parsial berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur. Artinya bahwa jika terjadi peningkatan Jumlah Unit Usaha sebesar 1 persen maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Gresik sebesar 0,060242 persen. Variabel investasi, dimana nilai probabilitasnya adalah 0,2212 nilai ini lebih besar dari nilai $\alpha = 5$ persen atau 0,05 ($0,2212 > 0,05$) yang berarti kondisi tersebut menolak H_1 dan menerima H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Investasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Kabupaten Gresik.

2.2 Landasan Teori

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan perancangan industri. Pengertian industri juga meliputi semua perusahaan yang mempunyai kegiatan tertentu dalam mengubah secara mekanik atau secara kimia bahan-bahan organik sehingga menjadi hasil baru.

2.2.1 Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan mencakup semua perusahaan/ usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri penunjang perakitan (Assembling) dari bagian suatu industri. (BPS, 2016)

Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu : Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih), Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang), Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang), Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang). Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenagakerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu. Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri

pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4*, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. (BPS, 2017)

2.2.1.1 Peran Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian

Peranan sektor industri pengolahan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri pengolahan telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional sejak tahun 1991, di samping untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, industri pengolahan non migas juga memiliki pangsa pasar luar negeri yang baik. Dari tahun ke tahun sektor industri pengolahan selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2006 sektor ini tumbuh 4,6 persen dan 4,7 persen di tahun 2007.

2.2.1.2 Kebijakan dalam Sektor Industri

Di bidang ekonomi, krisis berdampak pada menurunnya kinerja bisnis pada berbagai sektor usaha dan sangat dirasakan terutama di sektor industri. Hal ini karena umumnya industri-industri besar yang tidak berorientasi pada pemanfaatan bahan baku dan bahan setengah jadi dalam negeri. Semakin terpuruknya sektor swasta juga berdampak pada meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perekonomian Indonesia serta kondisi riil paska krisis ekonomi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Setelah terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan sektor industri masih sedikit lebih rendah bila

dibandingkan dengan pertumbuhannya pada saat sebelum krisis. Upaya mempercepat pembangunan, membangun kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, telah dilakukan dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi oleh pemerintah dan DPR menjadi UU No. 33 Tahun 2004.

Di sisi lain, isu-isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia terkait dengan sektor industri telah bergerak begitu cepat, secara kasat mata negara-negara maju lebih siap sehingga cenderung lebih mampu memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Dalam upaya mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang akan datang, diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas dalam jangka menengah, maupun jangka panjang baik oleh Pemerintah Pusat maupun prakarsa daerah. Kebijakan ini dapat berupa Undang-Undang Industri Nasional, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Perdagangan dan lain lain. Dapat pula berupa regulasi dari pemerintah dan Bank Indonesia. Peraturan daerah dibuat dengan pendekatan terhadap daerah masing-masing dengan merujuk kepada peraturan pusat dengan tujuan agar

peraturan tersebut dapat lebih berhasil dalam pelaksanaannya. Hal terpenting adalah arah dan kebijakan industri nasional yang disepakati bersama, sangat dibutuhkan agar industri tidak tumbuh secara alami tanpa kejelasan akan bentuk bangun industri yang akan terjadi, yang akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya pembangunan (inefisiensi) dan tidak terwujudnya tujuan pembangunan industri yang diinginkan.

Semua pihak yang bersangkutan dan berkepentingan mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif terhadap peraturan/regulasi yang telah dibuat agar dapat mencapai hasil yang optimal sehingga peraturan/regulasi tersebut tidak sia-sia.

2.2.2 Jumlah Unit Usaha

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Secara umum, pertumbuhan unit usaha pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

2.2.3 Investasi

Investasi adalah sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Di dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (*domestic fixed capital formation*).

Investasi bisa disebut juga penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun dan Yasin, 2003). Todaro (2000) mengemukakan bahwa persyaratan umum pembangunan ekonomi ada 3 (tiga) yaitu: a) Akumulasi modal, termasuk akumulasi modal baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, b) perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya, c) kemajuan teknologi.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes, menitik beratkan pada peranan tabungan dan investasi sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa asumsi yang melandasi teori tersebut, antara lain: (1). Perekonomian

dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh. (2). Dalam perekonomian dua sektor (Rumah tangga konsumen dan produsen) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. (3). Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). (4). Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal dan output (*Capital Output Ratio*=COR) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio* = ICOR).

2.2.3.1 Jenis-Jenis Investasi

1. Investasi berdasarkan pelaku investasi terbagi menjadi dua, yaitu ;
 - a. Autonomous Investment (investasi otonom) adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, artinya tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.
 - b. Induced investment (Investasi dorongan) adalah investasi yang besar kecilnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, baik itu pendapatan daerah ataupun pendapatan nasional, diadakannya investasi ini akibat adanya penambahan permintaan, dimana penambahan permintaan tersebut sebagai akibat dari penambahan pendapatan.
2. Pembentukan modal atau penanaman modal meliputi pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :

- a. Pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan;
- b. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya;
- c. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional

2.2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi di antaranya adalah (P. Eko Prasetyo, 2009: 98):

1. Tingkat bunga

Jika tingkat bunga rendah, maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi, karena kredit dari Bank menguntungkan untuk mengadakan investasi. sebaliknya jika tingkat bunga tinggi, maka tingkat investasi akan rendah, karena tingkat kredit dari Bank tidak dapat memberikan keuntungan dalam proyek investasi.

2. *Marginal Efficiency of Capital* (MEC)

Jika keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih kecil dari tingkat suku bunga riil yang berlaku, maka investasi tidak akan terjadi. Jika (MEC) yang diharapkan lebih tinggi daripada tingkat bunga riil, maka tingkat investasi

akan dilakukan. Jika (MEC) sama dengan tingkat bunga, maka pertimbangan untuk mengadakan investasi dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Peningkatan Aktifitas Perekonomian

Jika ada perkiraan peningkatan aktifitas ekonomi di masa yang akan datang, walaupun tingkat bunga lebih besar daripada (MEC), maka investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh para investor yang mempunyai insting tajam (*risk seeking*). Karena investor menganggap bahwa investasi dimasa yang akan datang akan memperoleh banyak keuntungan. Sekalipun faktor insting ini bukan faktor utama, tetapi penting untuk dipertimbangkan oleh para investor dalam mengambil keputusan.

4. Kestabilan Politik Suatu Negara

Semakin stabil kondisi politik suatu negara semakin baik iklim investasi di suatu negara tersebut, sehingga investasi baik dalam bentuk PMA atau PMDN di negara tersebut akan meningkat. Karena dengan situasi politik yang stabil, berarti *country risk* juga rendah yang berarti keuntungan investasi akan semakin baik.

5. Tingkat keuntungan Investasi yang akan diperoleh

Semakin tinggi tingkat keuntungan dalam berinvestasi suatu barang tertentu akan semakin besar tingkat investasi tersebut. Namun, secara umum

semakin tinggi tingkat keuntungan dari investasi juga semakin tinggi risikonya.

6. Faktor-faktor lain

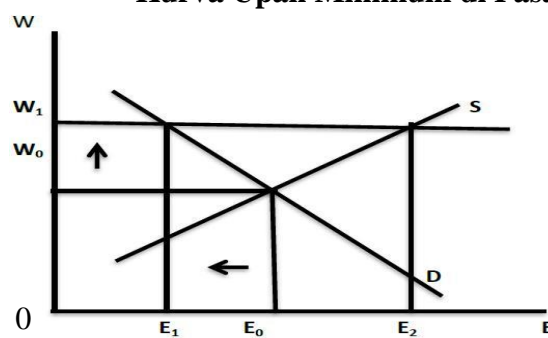
Selain kelima faktor tersebut, investasi juga cukup dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: tingkat kemajuan teknologi, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang, dan tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Kesimpulannya adalah bahwa hubungan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja adalah dengan adanya kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga tercipta lapangan usaha. Dengan terciptanya lapangan usaha baru maka akan banyak tenaga kerja terserap. Sehingga dengan penelitian ini yang dimaksud dengan investasi adalah suatu pengeluaran sejumlah dana yang dikeluarkan oleh investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang yang dinyatakan dalam rupiah.

2.2.4 Teori Upah dan Upah Minimum

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja.

Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan terendah (minimum) sebagai imbalan dari pengusaha yang diberikan kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap (Pratomo dan Saputra, 2011).

Gambar 2.1
Kurva Upah Minimum di Pasar Kompetitif



Sumber: Pratomo dan Saputra, 2011

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa dalam konteks penyerapan tenaga kerja tingkat keseimbangan dari tingkat upah dan tenaga kerja ditunjukkan oleh pertemuan antara kurva permintaan (D) dan kurva penawaran (S). Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 5, tingkat upah keseimbangan adalah w_0 , sedangkan E_0 keseimbangan tenaga kerja. Seandainya upah minimum berada di atas tingkat keseimbangan w_1 , kondisi ini akan menciptakan kelebihan penawaran tenaga

kerja (*excess supply of labour*) menggambarkan bahwa hanya E1 yang akan dipekerjakan dengan jumlah pekerja yang tersedia sebesar E2. Kelebihan penawaran ini menyebabkan turunnya tenaga kerja yang akan dipekerjakan dari E0 (tingkat keseimbangan) ke E1. E1 secara otomatis menunjukkan tingkat keseimbangan yang baru setelah adanya kebijakan upah minimum di dalam pasar kompetitif (Pratomo dan Saputra, 2011:269-285).

2.2.5 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh sektor atau uni usaha tertentu. Atau dapat juga dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja pada sektor usaha. Peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2013. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan faktor internalnya adalah tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal, serta pengeluaran tenaga kerja non upah.

2.2.5.1 Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja adalah keseluruhan aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha, pencari kerja serta perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dari pencari kerja untuk saling berhubungan. Proses mempertemukan pencari kerja ternyata memerlukan waktu lama. Dalam proses

ini, baik pencari kerja maupun pengusaha diharapkan pada suatu kenyataan sebagai berikut (Payaman J. Simanjutak, 2001: 39-42):

1. Pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang berbeda
2. Setiap perusahaan menghadapi lingkungan yang berbeda: Iuran (ouput), masukan (input), manajemen, teknologi, pasar, dll, sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memberikan tingkat upah, jaminan sosial dan lingkungan pekerjaan.
3. Baik pengusaha maupun pencari kerja sama-sama mempunyai informasi yang terbatas mengenai hal-hal yang dikemukakan dalam butir (1) dan (2).

2.2.6 Hubungan Antara Jumlah Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Tri Wahyu Rejekiningsih (2004), penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha. Hubungan antara jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja adalah positif. Semakin meningkatnya jumlah unit usaha, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, apabila jumlah unit usaha menurun maka akan mengurangi jumlah tenaga kerja.

Menurut Matz (2003) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.2.7 Hubungan Antara Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Mengenai investasi, hal ini sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan. Besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya permintaantenaga kerja. Secara teoritis, semakin besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja (Suparmoko, 1994).

Penanaman modal atau investasi dalam teori ekonomi adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang (Soekirno, 2003). Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang lebih tinggi diperlukan pula modal manusia yang mencukupi.

Pengalaman Indonesia selama ini juga menunjukkan betapa pentingnya investasi bagi kelangsungan Pembangunan atau Pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Berdasarkan data BPS, sejak awal 2000, PDB Indonesia memang mengalami pertumbuhan positif, setelah dua tahun berturut-turut sebelumnya negatif. Namun laju pertumbuhannya sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata - rata per tahun yang dialami Indonesia pada periode pra krisis. Alasannya sederhana, pergerakan ekonomi nasional sejak akhir 1999 hingga kini lebih didorong oleh pertumbuhan konsumsi bukan oleh pertumbuhan

investasi yang signifikan, jika pola pertumbuhan ekonomi terus seperti ini tanpa adanya kontribusi yang berarti dari investasi, dapat dipastikan pertumbuhan tersebut tidak dapat berlanjut terus (Tambunan, 2000).

Dengan anggapan bahwa perekonomian selalu berusaha mencapai kondisi optimal maka penambahan penggunaan capital melalui kegiatan investasi, yang berarti meningkatnya kapasitas produksi itu, akan meningkatkan pula penggunaan tenaga kerja, yang selanjutnya secara bersama-sama menaikkan tingkat output maksimum yang mungkin di capai. Semakin besar penggunaan capital, akan semakin besar pula pertumbuhan investasi yang signifikan, jika pola pertumbuhan ekonomi terus seperti ini tanpa adanya kontribusi yang berarti dari investasi, dapat dipastikan pertumbuhan tersebut tidak dapat berlanjut terus (Tambunan, 2000).

Dengan adanya peningkatan investasi pada suatu industri, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan oleh dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Matz, 2003).

2.2.8 Hubungan Antara Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Upah juga mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan

pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja (Simanjuntak, 2002).

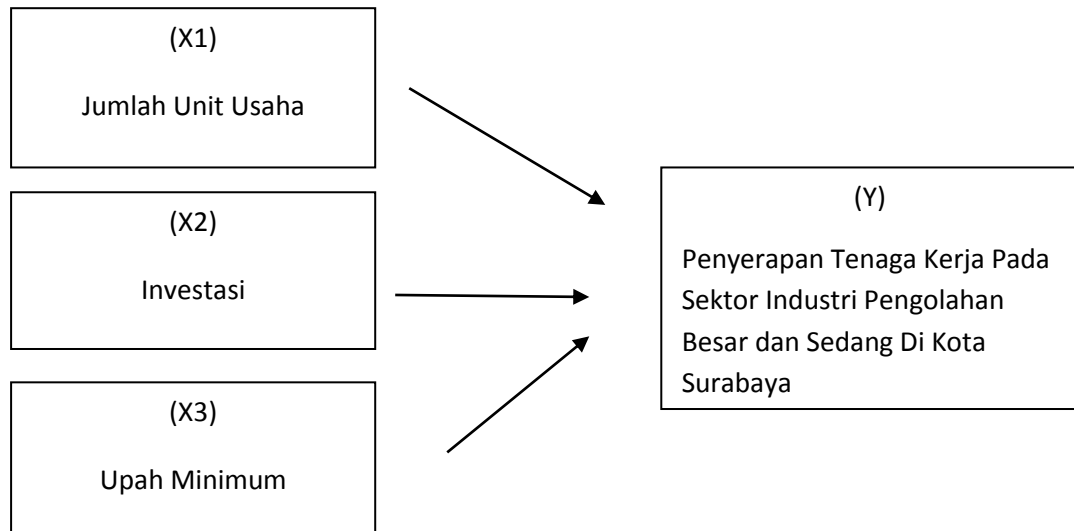
Upah tenaga kerja, bagi perusahaan merupakan biaya produksi sehingga dengan meningkatnya upah tenaga kerja akan mengurangi keuntungan perusahaan. Pada umumnya, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan disamping dengan cara meminimalkan biaya juga mengoptimalkan input produksi.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Haryo (2001), dimana kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Malthus (1766 – 1834), Salah satu tokoh mazhab klasik ini meninjau upah berkaitan dengan perubahan penduduk. Upah adalah harga penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu, tingkat upah yang terjadi adalah karena hasil bekerjanya permintaan dan penawaran. Sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran (*supply side economies*). Tingkat upah, sebagai harga penggunaan tenaga kerja, ditentukan Perbedaan Upah dan Penggunaan Tenaga Kerja.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut :



2.4 Hipotesis

Dari penjelasan diatas dalam penelitian ini diambil hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga variabel jumlah unit usaha berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan besar dan sedang di Kota Suarabaya.
2. Diduga variabel investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerjapada sektor industri pengolahan besar dan sedangdi Kota Surabaya.
3. Diduga variabel Upah Minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan besar dan sedang di Kota Surabaya.

4. Diduga variabel Jumlah Unit Usaha, Investasi dan Upah Minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan besar dan sedang di Kota Surabaya.